

# **Bingkai Berita Kasus Dugaan Korupsi Aliran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada *detik.com* dan *Tempo Interaktif***

Dewi Novianti

Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. Babarsari No. 2  
Telp. 08157904082, email : [dewinovianti\\_upn@yahoo.co.id](mailto:dewinovianti_upn@yahoo.co.id)

## **Abstract**

*The corruption case that was interested to analyze was the suspected corruption of the flow of Indonesian Liquidity Fund. This case involved two obligors: Anthony salim and Sjamsul Nursalim. The anti climax of the case was the release of the two suspects as the court was unable to prove the act of corruption and all debts of the suspects to the government were considered settled. Research method used was framing analysis. This research investigates how two online news media (detik.com and tempo interaktif) construct the presented news in relation to the issue above. The framing of the two online news media in relation to the corruption case tended to be negative. This can be seen from the elements of syntaxes, thematic, detail, meaning, sentence structure, rhetoric, lexicon, metaphor. The negative tendency was also found in the news titles that the online news media adopted, such as Former officials were questioned, BLBI case shows no progress, No further additional time for BLBI investigation, Attorney general stops BLBI investigation. Nonetheless, both online news media presented fair news coverage indicated through the usage of news sources. Both online news media tended to question the result of Supreme Court that declared both suspects were proved not guilty of act of corruption. Both media adopted straight news and tended to deligitimise the existing power*

## **Abstrak**

Kasus korupsi menarik untuk diteliti adalah adanya dugaan korupsi pada aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini melibatkan dua obligor sebagai tersangka yakni Anthony salim dan Sjamsul Nursalim. Sebagai antiklimaks dari kasus ini, kedua tersangka akhirnya dibebaskan dengan alasan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan utang kedua tersangka kepada pemerintah dianggap sudah lunas. Metode dalam penelitian ini adalah analisis framing yaitu menganalisis bagaimana dua media online yakni detikcom dan Tempo interaktif mengkonstruksikan pesan melalui berita yang disajikan terkait kasus di atas. Bingkai (*Frame*) yang dikonstruksi oleh kedua media cenderung negatif. Hal ini bisa dilihat dari elemen sintaksis, tematik, detil, maksud, bentuk kalimat, retorik/stilistik, leksikon, metafora. Judul-judul yang diambil oleh kedua media ini juga bersifat lugas seperti; Banyak Mantan Pejabat Diperiksa, Kasus BLBI Ada Kemajuan; Tak Ada Perpanjangan Waktu Lagi Bagi Penyelidikan BLBI; Kejaksaan Hentikan Penyelidikan BLBI, dan sebagainya. Kedua media tersebut berusaha memaparkan secara *fair coverage* dari narasumber yang disajikan namun cenderung menyudutkan hasil keputusan Kejaksaan Pusat bahwa kedua tersangka dinyatakan tidak bersalah karena tidak terbukti melakukan korupsi. Kedua media ini cenderung mendelegitimasi kekuasaan.

**Kata Kunci :** Korupsi, bantuan likuiditas bank Indonesia, analisi framing, ideologi

## Pendahuluan

Era keterbukaan membuat berbagai media berlomba untuk menyampaikan informasi terkini akurat dan terpercaya. Salah satunya adalah media internet yang dapat melayani khalayak dengan interaktifitas tinggi. Media internet ini mulai digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan informasi khalayak.

Internet memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia manapun untuk saling berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Internet mengubah komunikasi dengan beberapa cara yang mendasar. Media massa tradisional pada dasarnya menawarkan model komunikasi “satu-untuk-banyak”. Sedangkan internet memberikan model-model tambahan: “banyak-untuk-satu” (*e-mail* ke satu alamat sentral, banyaknya pengguna yang berinteraksi dengan satu *website*) dan “banyak untuk banyak” (*e-mail*, *milis*, kelompok-kelompok baru). Internet menawarkan potensi komunikasi yang lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis dibandingkan yang ditawarkan oleh media massa sebelumnya (Severin&Tankard, 2007:444-445).

Adanya keterbukaan pada era reformasi, membuat berbagai informasi aktual yang pada era Orde Baru sering dianggap terlarang mulai bermunculan. Salah satu fakta yang banyak terungkap di media massa era reformasi adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi di berbagai lini kehidupan bangsa ini. Sedemikian kompleks dan banyaknya permasalahan korupsi di Indonesia menjadikan pemerintah membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK didasari atas pertimbangan aparat penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, Kejaksaan dan hakim belum maksimal dalam melakukan usaha pemberantasan korupsi.

Salah satu kasus yang menarik yang ditangani oleh KPK adalah dugaan korupsi aliran dana Bank Indonesia. Aliran dana Bank Indonesia Rp100 miliar berawal dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditandatangani oleh Ketua BPK Anwar Nasution. Laporan dengan nomor 115/S/I-IV/11/2006 itu dikirim ke KPK pada 14 November 2006. Dalam laporan

itu disebutkan, melalui rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 diputuskan meminta Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) menyediakan dana sebesar Rp100 miliar untuk dua keperluan.

Pertama, pencairan dana Rp68,5 miliar untuk membantu proses hukum kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan lima mantan dewan gubernur dan mantan direksi BI, juga melalui sejumlah cek berdasarkan keputusan rapat Dewan Gubernur BI pada 22 Juli 2003. Dana bantuan hukum itu diberikan kepada Soedrajat Djiwandono (mantan Gubernur BI), Iwan R Prawiranata (mantan Deputy Gubernur BI), Heru Soepratomo (mantan Deputy Gubernur BI), Hendrobudiyanto (mantan direksi BI), dan Paul Sutopo (mantan direksi BI). Mereka terjerat hukum dalam kasus BLBI, kredit ekspor, dan kasus lainnya sehubungan dengan penanganan krisis ekonomi 1997-1998.

Kedua, Rp 31,5 miliar diserahkan kepada Komisi IX DPR periode 1999-2004 untuk pembahasan dan diseminasi sejumlah UU tentang BI. Hasil audit menyebutkan dana untuk Komisi IX DPR periode 1999-2004 dicairkan melalui tujuh cek.

Dana yang mengalir ke Senayan (anggota DPR) itu berasal dari YPPI. Pencairannya melalui tujuh cek yang dikeluarkan bertahap mulai 30 Juni hingga delapan Desember 2003. Pencairan melalui tim sosialisasi yang terdiri atas tiga pejabat BI, yakni Oey Hoey Tiong yang saat itu menjabat Deputy Direktur Direktorat Hukum, Rusli Simanjuntak (kepala biro gubernur), dan Asnar Ashari. Setelah tujuh cek senilai Rp31,5 miliar itu dicairkan, langsung diserahkan ke DPR. Pencairan tersebut merupakan realisasi hasil keputusan rapat Dewan Gubernur BI pada tiga Juni 2003.

Setelah setahun menerima surat temuan-an BPK tersebut, KPK baru mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) pada September 2007. Diikuti pemeriksaan sejumlah pejabat dan mantan pejabat BI yang diduga mengetahui aliran dana tersebut.

Hasil audit BPK itu menunjukkan secara nyata bahwa telah terjadi gratifikasi dalam kasus aliran dana BI. Sudah ditemukan pihak pemberi dan tujuan atau motivasi pemberian itu kepada para

anggota DPR yang sedang melakukan revisi UU BI. (<http://www.media Indonesia.com>).

Kasus aliran dana BI ini sebenarnya merupakan buntut dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih menyisakan misteri: siapa yang bertanggung jawab? Para pengemplantang dana BLBI masih berkeliaran di luar negeri dan terus menikmati uang negara triliunan rupiah. Penggunaan dana YPPI atas rekomendasi rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 dimaksudkan untuk penyelesaian masalah BLBI dan pembahasan amendemen UU No 23 Tahun 1999 tentang BI. Saat itu, masih terjadi perdebatan siapa yang bertanggung jawab terhadap dana BLBI, apakah pemerintah atau BI. Dengan demikian, DPR merasa perlu membentuk tim khusus untuk mempelajari kasus ini. Pembentukan tim dimaksudkan untuk mencari titik terang kasus BLBI. Selama ini kasus BLBI menjadi beban BI sehingga laporan keuangan BI dinyatakan *disclaimer*.

Kasus BLBI boleh dibilang bukan hanya merugikan negara triliunan rupiah, namun telah memakan korban paling tidak tiga Gubernur BI. Penanganan yang tak kunjung selesai menimbulkan pesimisme berbagai pihak bahwa skandal ini bisa terungkap.

Tim jaksa BLBI diberi kesempatan bekerja selama tiga bulan. Ternyata waktu yang diberikan belum cukup untuk mengumpulkan bukti. Akhirnya diperpanjang dua bulan hingga Desember 2007. Waktu tambahan ini pun ternyata tak mampu menyeret orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Bahkan Kejaksaan pada awal tahun ini sempat meminta perpanjangan penyelidikan selama dua bulan hingga Februari 2008. Penyelidikan kasus ini memakan waktu lama mengingat bukti penting terkait penyerahan aset obligor sulit dilacak. Bahkan sebagian bukti sudah hangus. Kasus BLBI berawal pada 1 November 1997. Saat itu (*International Monetary Fund*) IMF menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai, akibat krisis moneter yang terjadi di beberapa kawasan. Tak pelak, masyarakat berbondong-bondong ke bank (*rush*) untuk menarik tabungan mereka, kemudian menyimpannya di rumah masing-masing atau di bank-bank asing di dalam maupun di luar negeri. Akibat

penarikan dana masyarakat pada bank-bank di Indonesia tersebut, terjadi *capital outflow* ke luar Indonesia lebih dari USD 8 miliar.

Ada tiga tahapan yang berpotensi merugikan keuangan negara dari kasus ini, mulai dari tahap penyaluran, penyerahan aset, hingga tahap penjualan aset. Oleh karena itu, Pejabat pemerintah dan pejabat BI yang memutuskan penutupan 16 bank itu harus diperiksa. Awalnya, skema BLBI diberikan kepada 48 bank pada Desember 1998. Namun, berdasarkan audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp138 triliun (<http://www.okezone.com>).

Menilik kasus tersebut peran media massa sangat berpengaruh dalam pemberitaan dan pembentukan opini khalayak. Seperti yang dikemukakan oleh Dennis McQuail (1987, 51-53) media telah menjadi sumber yang dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dari citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif.

Selain kemampuan media untuk menyihir pembaca, pendengar dan penontonnya seperti disebutkan di atas awak media menurut Gamson dan Modigliani (Novianti, 2006:41) juga dapat menerapkan standar kebenaran, matrik objektivitas, serta batasan-batasan etika tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Awak media juga dapat membatasi atau menafsirkan komentar-komentar sumber berita, serta memberi porsi pemberitaan yang berbeda antara satu sumber berita dengan sumber berita yang lainnya, serta mengemas suatu wacana berita dengan perspektif, gaya bahasa, retorika, dan *commonsense* yang mereka kehendaki. Mereka juga lazim menguraikan gagasannya, menggunakan gaya bahasanya sendiri, serta mendistribusikan retorika-retorika untuk meneguhkan keberpihakan atau kecenderungan tertentu. Semuanya itu tidak terlepas dari ideologi media. Ideologi merupakan prinsip untuk mendasari tingkah laku seseorang atau suatu bangsa dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan ideologi adalah keseluruhan motivasi dalam bertindak, sebab ideologi menentukan tingkah laku kehidupan sosial, ekonomi dan politik (Novianti, 2006:43).

Berita kasus dugaan korupsi BI periode Juli 2007 sampai dengan Februari 2008 salah satu contoh atau cara situs internet *detik.com* dan Tempo interaktif dalam menerapkan ideologi yang mereka anut melalui pemberitaan-pemberitaannya. Setiap berita yang dimuat oleh media massa merupakan sebuah konstruksi realitas yang dikemas sesuai dengan kebijakan media tersebut. Bagaimana sebuah media mengambil sikap atas terjadinya sebuah kasus dan mengemasnya dalam sebuah berita sehingga dapat diketahui kecenderungan media tersebut.

Ideologi media khususnya *detik.com* dan Tempo interaktif sulit dihilangkan dalam berita-berita yang dimuat. Konsep ideologi menurut pendekatan konstruksionisme dapat membantu menjelaskan bagaimana bisa wartawan membuat liputan berita memihak satu pandangan, menempatkan satu pandangan lebih menonjol dibandingkan pandangan kelompok lain dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua peran yang dimainkan media. Pertama, media adalah sumber dari kekuasaan hegemonik, di mana kesadaran khalayak dikuasai. Kedua, media juga dapat menjadi sumber legitimasi, di mana lewat media mereka yang berkuasa dapat memanfaatkan untuk kepentingannya. Hal ini terkait dengan Teori Hegemoni yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci. Teori ini berisi tentang pengendalian masyarakat oleh elit atau kelas yang mementingkan diri sendiri. Kelas Penguasa kurang dapat memberikan penjelasan yang baik (pada kelas yang terhegemoni) dalam mencapai keuntungan dengan menggunakan kekuatan media (McQuail, 1987:188).

Dominasi media massa dalam kehidupan masyarakat tidak saja dalam bentuk perangkat keras semata, melainkan juga dalam bentuk penyajian isi. Isi yang disajikan oleh media sering dibentuk sedemikian rupa, sehingga bisa menimbulkan rasa percaya khalayak yang mengkonsumsi berita tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Adoni dan Mane (1984:324) dalam artikelnya yang berjudul *Media and The Constructing Of Reality*, salah satu realitas sosial yang dibangun adalah realitas sosial simbolik (*symbolic reality*) yakni bentuk-bentuk simbolik dari realitas sosial objektif yang biasanya diketahui

khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi serta isi media.

Penelitian ini berangkat dari adanya pertanyaan mendasar seputar terjadinya kasus dugaan korupsi aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana *detik.com* dan Tempo interaktif membingkai kasus dugaan korupsi aliran dana BLBI sebagai suatu *symbolic reality* dalam pemberitaan mereka.

### Metode Penelitian

Metode yang dipilih ketika meneliti topik apapun akan tergantung pada pertanyaan yang dicoba untuk dijawab dalam penelitian tersebut. Ketika yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah tentang isi berita, tipe penelitian yang signifikan untuk menjelaskannya adalah tipe penelitian kualitatif (Tuchman dalam Jensen & Jankowski, 1991:80).

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis isi dengan konteks *framing*. Tidak Seperti analisis isi konvensional yang secara tipikal difokuskan pada muatan isi teks berita yang manifes, analisis *framing* lebih difokuskan pada komentar-komentar interpretatif disekitar isi manifes tersebut (Mc Cauley & frederick, 1996:2).

Objek analisis dalam penelitian ini adalah teks berita pada *detik.com* dan Tempo interaktif seputar kasus dugaan korupsi aliran dana BLBI. Digunakannya teks berita sebagai analisis karena data teks merupakan cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Media yang menjadi obyek penelitian adalah *detik.com* dan Tempo Interaktif.

Judul-judul berita yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut : Berita *detik.com*: (1). Banyak Mantan Pejabat Diperiksa, Kasus BLBI Ada Kemajuan, (2). Tak Ada Perpanjangan Waktu Lagi Bagi Penyelidikan BLBI, (3). Kemas: 7 Bulan Kejagung Siang Malam Selidiki BLBI. Berita Tempo Interaktif: (1). Bambang Subianto Kembali Diperiksa, (2). Badan Kehormatan Segera Panggil Anggota Dewan yang Terkait Aliran Dana BI, (3). Kejaksaan Hentikan Penyelidikan BLBI.

Periode waktu yang dipilih dalam penelitian ini adalah dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Februari 2008. Rentang waktu ini diambil berdasarkan alasan bahwa Kejaksaan sudah mulai menyelidiki kasus ini sejak 23 Juli 2007. Tim jaksa BLBI diberi kesempatan bekerja selama tiga bulan. Ternyata waktu yang diberikan belum cukup untuk mengumpulkan bukti. Akhirnya diperpanjang dua bulan hingga Desember 2007. Waktu tambahan ini pun ternyata tak mampu menyeret orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Bahkan Kejaksaan pada awal tahun 2008 sempat meminta perpanjangan penyelidikan selama dua bulan hingga Februari 2008. Penyelidikan kasus ini memakan waktu lama mengingat bukti penting terkait penyerahan aset obligor sulit dilacak.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan perangkat *framing* yang dikembangkan dari model Pan Zhongdan dan Gerald M Kosicki. Model *framing* milik Pan dan Kosicki berusaha menggabungkan dimensi sosiologis dan psikologis dimana *framing* kemudian menjadi sebuah pusat organisasi ide wartawan untuk menyajikan berita kepada khalayak. Pan dan Kosicki juga memiliki pandangan tentang berbagai cara wartawan untuk melakukan penonjolan terhadap suatu peristiwa. Cara atau perangkat tersebut dapat menjadi cara analisis data berkaitan dengan penelitian tentang cara media mengemas berita.

Teknik pengumpulan data berdasarkan studi dokumentasi untuk mendapatkan data dan materi penelitian yang berkaitan dengan sajian berita tentang kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Data yang telah terkumpul kemudian akan dimasukkan dalam kategori yang telah ditentukan. Kategorisasi data berdasarkan pada perangkat *framing* yang telah dikembangkan oleh Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Model yang dikembangkan oleh Pan dan Kosicki berasumsi bahwa setiap berita memiliki *frame* yang merupakan representasi dari ideologi wartawan dan media. Model *framing* milik Pan dan Kosicki sampai saat ini dianggap sebagai model yang cukup lengkap dan banyak digunakan dalam penelitian analisis *framing*.

Perangkat *framing* dibagi menjadi empat struktur besar, yakni: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat perangkat tersebut dapat dijabarkan pada tabel 1.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dua media *online* yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah *detik.com* dan Tempo Interaktif, membongkar kasus dugaan penyelewengan aliran dana BLBI secara sama. Temuan teks perangkat *framing* menunjukkan kedua media *online* membongkar secara negatif kasus dugaan korupsi aliran dana BLBI. Keduanya mengkonstruksikan pesan melalui berita

Tabel 1: Struktur Perangkat *Framing*

STRUKTUR	PERANGKAT <i>FRAMING</i>	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup.
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	5W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	Detail Maksud Nominalisasi Koherensi Bentuk kalimat Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	Leksikon Grafis Metafora Pengandaian	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber : Nugroho, Eriyanto, *Surdiasis, ISAI, 1999, Jakarta, h. 30-31*



yang diangkat lebih memperkuat dugaan adanya korupsi dan penyelewengan dana BLBI. Ini bisa dilihat dari perangkat *framing* detil dan maksud. Detil memaparkan keseriusan KPK dalam menangani kasus BLBI ini dengan menemukan sejumlah bukti kuat yang dapat menyeret para tersangka kasus BLBI. Berkas temuan ini diserahkan ke Badan Kehormatan DPR disebabkan ada anggota dewan yang diduga terlibat aliran dana dari Bank Indonesia Rp 31,5 miliar.

Sedangkan elemen maksud dari berita dengan judul *Badan Kehormatan Segera Panggil Anggota Dewan yang Terkait Aliran Dana BI* adalah semakin terangnya jalan untuk menuju terselesaikannya kasus aliran dana BI. Besar harapan rakyat, dana yang diduga disewewangkan akan kembali dan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Harapan ini diwujudkan dari kinerja Tim KPK yang telah menemukan sejumlah bukti penting yang akan menguak kasus ini. Bukti inilah nantinya akan menyeret beberapa nama termasuk diantaranya anggota DPR yang diduga terkait kasus BLBI.

Kasus dugaan korupsi aliran dana BLBI menyisakan tanda tanya besar. Walaupun kasus ini pada akhirnya oleh Kejaksaan Agung ditutup karena dianggap tidak terbukti adanya korupsi pada kedua *obligor* baik Anthony Salim maupun Syamsul Nursalim. Keduanya dianggap cukup kooperatif dan telah memenuhi semua prosedur yang ada. Hasilnya, keduanya dianggap telah melunasi seluruh utang mereka kepada Pemerintah. Anthony Salim mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL), sementara Sjamsul Nursalim mendapat surat penyelesaian utang atau *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) atau perjanjian penyelesaian kewajiban BLBI melalui penyerahan aset.

Fenomena ironi ini menelan dana triliunan rupiah yang seyogianya dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi kenyataan sebaliknya menyejahterakan sekelompok kecil orang. Akhir cerita tampak dipaksakan dua hari sebelum diumumkan kasus ini dinyatakan ditutup, yakni tanggal 27 Februari 2008, ada berita bahwa Badan Kehormatan DPR berjanji memanggil Hamka Yandhu, anggota DPR dari Partai Golkar, yang diduga terkait aliran dana dari Bank Indone-

sia Rp 31,5 miliar, awal Maret. Pemanggilan dilakukan setelah Badan Kehormatan menerima hasil pemeriksaan KPK. Dua hari kemudian tepatnya tanggal 29 Februari 2008 kasus ini dipetieskan.

Akhir dari drama pengadilan aliran dana BLBI adalah Utang kedua obligor Taipan Anthony Salim dan Sjamsul Nursalim dianggap lunas. Jumlah utang BLBI Anthony Salim sebesar Rp 29 triliun sudah lunas dengan cara penyerahan 92,8 persen saham Bank Central Asia (BCA) kepada pemerintah. Sedangkan utang perusahaan afiliasi BCA sebesar Rp 52,7 triliun belum lunas. Utang itu dibayar dengan cara menyerahkan saham 108 perusahaan Anthony kepada pemerintah. Namun belakangan, nilai aset perusahaan itu turun menjadi Rp 19 triliun. Akhirnya Anthony Salim mengantongi SKL

Sedangkan obligor Sjamsul Nursalim berutang Rp 47 triliun. Utang itu dibayar dengan menyerahkan aset Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Rp 18,85 triliun. Sisanya dibayar tunai Rp 1 triliun dan penyerahan aset Dipasena, Gajah Tunggal Tire dan Gajah Tunggal Petroseal

Walhasil, Sjamsul Nursalim mendapat surat penyelesaian utang atau MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*). Namun, saat pemerintah akan menjual aset tersebut, nilainya turun menjadi Rp 3,4 triliun.

Kronologis kasus aliran dana BLBI ini perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton tetapi juga bisa berfungsi sebagai kontrol. Oleh karena itu, pemberitaan di media massa haruslah mampu menyampaikan secara (*fair coverage*) adil berimbang. Namun demikian, dalam ranah riil mediapun tidak bisa betul-betul *fair coverage* dalam mengkonstruksi pesan. Berita yang disampaikan dibingkai (*frame*) sesuai dengan ideologi media itu sendiri. *Detik.com* dan *Tempo* interaktif misalnya, kedua media inipun ketika membingkai pesan tidak terlepas dari ideologi kedua media.

*Detik.com* dan *Tempo* Interaktif dalam menyampaikan berita terkesan lugas dan *to the point*. Ini disebabkan kedua media tersebut bersifat *online*. Media bersifat *online* ini memang disampaikan secara singkat dengan tujuan agar pa-

ra pembaca langsung dengan mudah menangkap intinya. Di samping itu khalayak sasaran mereka adalah orang-orang sibuk, mobilitas tinggi, kalangan menengah ke atas, dan terpelajar, sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk mengonsumsi berita. Khalayak sasaran seperti ini ingin mengetahui berita secara simpel, mudah dicerna, dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca. Karena sifatnya yang *online*, sehingga dapat diakses di mana saja kapan saja, membuat mudah para pembacanya.

Judul-judul yang diambil oleh kedua media ini juga bersifat lugas seperti; Banyak Mantan Pejabat Diperiksa, Kasus BLBI Ada Kemajuan; Tak Ada Perpanjangan Waktu Lagi Bagi Penyelidikan BLBI; Kejaksan Hentikan Penyelidikan BLBI, dan sebagainya.

Bingkai (*Frame*) yang dikonstruksi oleh *detik.com* maupun Tempo Interaktif terkait kasus dugaan korupsi pada aliran dana BLBI ini cenderung memposisikan diri sebagai *counter hegemony*. Hal ini bisa dilihat dari elemen sintaksis, tematik, detil, maksud, bentuk kalimat, retorik/stilistik, leksikon, metafora. Seperti bingkai pada *detik.com*; *Kemas beralih*, bukti-bukti penting terkait penyerahan aset obligor sulit dilacak. Bahkan sebagian bukti hangus terbakar. Hal itu membuat penyelidikan BLBI menjadi lama.

Kata beralih bermakna membuat alasan yang dibuat-buat atau istilah sarkasmenya alasan yang tidak masuk akal atau menyangkal. Sebenarnya kata beralih bisa saja diganti dengan kata beralasan atau menyatakan. Komunikator memilih diksi tersebut ingin menggiring pembacanya ke arah negatif terhadap pernyataan Kemas yang mengatakan bukti-bukti penting terkait penyerahan aset obligor sulit dilacak padahal bukti ini merupakan bukti kunci yang dapat menguak tabir kasus penyelewengan dana BLBI yang jumlahnya tidak sedikit. Serta ada sebagian bukti yang hangus terbakar. Apa sebab terbakarnya bukti tidak dijelaskan, apakah murni kecelakaan sehingga menyebabkan bukti tersebut terbakar, ataukah ada sebab lain yakni bukti tersebut sengaja dibakar oleh oknum tertentu yang bermaksud menghilangkan jejak bukti.

Sedangkan *counter hegemony* dari Tempo Interaktif bisa dilihat pada leksikon berikut;

Sebelumnya, Kwik Kian Gie menuding Bambang Subianto tahu persis soal BLBI. Pasalnya, kata Kwik, Bambang membidani lahirnya lembaga yang bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kata menuding yang dicetak tebal sebagai bentuk penekanan dari kata menuduh. Menuding dalam makna denotatif (arti sesungguhnya) adalah menunjuk ke arah wajah orang lain dikarenakan marah. Kwik digambarkan oleh komunikator menuduh secara keras kepada Bambang sebagai orang yang tahu persis kasus BLBI. Tuduhan ini diikuti oleh fakta bahwa Bambang telah membidani lahirnya BPPN.

Sebelumnya, Kwik Kian Gie menuding Bambang Subianto tahu persis soal BLBI. Pasalnya, kata Kwik, Bambang membidani lahirnya lembaga yang bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kata membidani yang dicetak tebal merupakan bentuk metafora. Membidani berarti membantu proses melahirkan, maksudnya di sini adalah orang yang membantu terwujudnya lembaga yang bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bambang Subianto sebagai salah satu tokoh penggagas munculnya BPPN cikal bakal lahirnya BLBI yang membawa dampak penyelewengan sejumlah besar dana pemerintah ke beberapa bank.

Dari kedua contoh di atas tampak di mana kedua media *online* tersebut cenderung membingkai secara negatif. Dari diksi yang mereka pilih seperti pada *detik.com* kata beralih, sementara Tempo Interaktif memilih diksi menuding, membidani. Pilihan kata menunjukkan bingkai berita. Bingkai yang dikonstruksi kedua media juga cenderung mengajak emosi pembacanya turut mengadili jalannya pemeriksaan dan penyelidikan kasus BLBI ini. Kedua media ini mencoba memaparkan fakta berdasarkan data-data yang mereka peroleh. Namun fungsi *gate keeping* tidak bisa dihindari, walaupun sudah dikemas secara berhati-hati tetapi tetap saja media tidak bisa menghindari ideologi yang mereka usung.

Baik *detik.com* khususnya Detiknews maupun Tempo Interaktif sama-sama media yang memposisikan diri sebagai media yang fokus pada

berita politik yang bersifat *straight news*. Sehingga ideologi yang mereka usung adalah ideologi politik media. Kedua media ini cenderung mendelegitimasi dari kekuasaan yang ada ini berarti pula kedua media *online* tersebut berusaha memposisikan diri sebagai *counter hegemony* dari kekuasaan yang ada. Ini terlihat dari pemberitaan kedua media *online* tersebut dengan menyatakan bahwa tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan banyak dipanggil sebagai saksi ada 67 orang saksi yang dimintai keterangan. Bahkan secara gamblang dari judul berita *Bambang Subianto Kembali diperiksa* menyebut nama. Bambang adalah mantan menteri Keuangan di era Pemerintahan BJ Habibie. Bahkan ada tuduhan keras dari Kwik Kian Gie mantan Menteri Koordinator Perekonomian terhadap Bambang sebagai tokoh yang membidani lahirnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang merupakan cikal bakal lahirnya BLBI. Fakta dan data yang dipaparkan kedua media ini terkesan sengaja membuka tabir kronologis kasus BLBI ini dengan memaparkan jumlah angka yang fantastis yakni triliunan rupiah. Angka yang sangat besar itu di mata masyarakat awam tentulah sangat mengejutkan. Apalagi setelah aset-aset dari para obligor diserahkan kepada pemerintah ternyata setelah dijual angka tersebut menurun sangat drastis. Sementara para pengemplang dana BLBI telah mengantongi surat lunas. Tidak bisa dibayangkan betapa kecewanya rakyat bangsa ini. Uang triliunan rupiah raib begitu saja sementara para obligor dianggap tidak bersalah.

Seolah-olah kedua media *online* tersebut ingin menyampaikan bahwa pengadilan sesungguhnya adalah rakyat, bukan Kejaksaan Agung. Sementara media adalah pihak pencari fakta dan data, kemudian menyampaikannya kepada rakyat atau pembaca. Silahkan rakyat atau pembaca yang menilai sendiri. Namun, tanpa disadari ternyata media pun tidak bisa lepas dari ideologi yang mereka usung sehingga ketika mereka mengemas berita sebenarnya mencoba menggiring pembacanya pada suatu tujuan tertentu

## Simpulan

Kasus dugaan korupsi pada aliran dana BLBI telah usai digelar. Kasus ini akhirnya ditutup

walaupun menyisakan kecewa banyak pihak termasuk DPR. Uang triliunan rupiah raib tidak kembali sementara para obligor lepas dengan mengantongi surat keterangan lunas. Pihak Kejaksaan berusaha mengkonter bahwa sesungguhnya kedua obligor telah melunasi utang hanya saja nilai aset menurun tajam setelah dijual kembali oleh pemerintah. Semuanya ini dapat diikuti melalui media yang memberitakan kasus tersebut.

Sebagai media *online* kedua media tersebut mengkonstruksi pesan secara lugas dan *to the point*. Ini sengaja dilakukan karena sifatnya yang *online* dan sasaran khalayaknya yang bersifat mobil, tidak punya banyak waktu, dari kalangan terpelajar, dan dari kalangan menengah ke atas. Khalayak sasaran seperti ini ingin mengetahui berita secara simpel, mudah dicerna, dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca. Oleh karena sifatnya yang *online*, sehingga dapat diakses dimana saja kapan saja, membuat mudah para pembacanya.

Bingkai (*Frame*) yang dikonstruksi oleh kedua media ini cenderung sama yakni membingkai secara negatif kasus BLBI. Bingkai ini tidak muncul dengan sendirinya tetapi dikonstruksi oleh awak media melalui proses *gate keeping*. Dalam proses inilah nilai-nilai ideologi media dibangun. Kedua media dalam penelitian ini baik detikcom maupun Tempo interaktif mengusung ideologi politik media. Ini tampak dari posisi kedua media yang fokus pada berita politik yang bersifat *straight news*. Kedua media ini cenderung mendelegitimasi dari kekuasaan yang ada dengan demikian kedua media tersebut berfungsi sebagai *counter hegemony* dari kekuasaan yang ada. Delegitimasi ini terlihat dari pemberitaan mereka dengan menyatakan bahwa tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan banyak dipanggil sebagai saksi. Bahkan Kwik Kian Gie mantan Menteri Koordinator Perekonomian menuding Bambang (mantan Menteri Keuangan era pemerintahan BJ Habibie) sebagai tokoh yang membidani lahirnya BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang merupakan cikal bakal lahirnya BLBI.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada para pembaca diharapkan bisa menyikapi berita ini secara bijaksana. Bijaksana di sini maksudnya pembaca tidak hanya percaya begitu saja berita dari satu media tetapi perlu ada



pembandingan untuk mampu melihat lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya duduk permasalahan kasus BLBI ini. Di samping itu para pembaca diharapkan mampu menilai bagaimana sesungguhnya media mengkonstruksi pesan berdasarkan nilai ideologi yang mereka anut.

Saran kepada pihak media, diharapkan dalam menggali berita hendaknya bisa lebih dalam lagi misalnya dengan mewawancarai banyak nara sumber dan bersifat *fair coverage* sehingga akan lebih menarik pembaca.

### Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis wilayah V Yogyakarta yang telah mendanai penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta.

### Daftar Pustaka

- Adoni, Hanna & Sherill Mane, Juli 1984, *Media And The Social Construction Of Reality*, dalam Communication Research Vol.II, Sage Publication.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana, : Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Hidayat, Dedy N., 1999, Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi, *Jurnal ISKI*, Vol.3 April, Jakarta.
- McQuail. Denis, 1987, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Novianti, Dewi, 2006, Wacana Media dalam Kasus Bom Bali (Pertarungan Wacana Harian republika dan Harian Kompas dalam Kasus Bom Bali), *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 4 No. 1, Jurusan Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Nugroho, Bimo, Eriyanto, Frans Surdiasis, 1999, *Politik Media Mengemas Berita*, ISAI, Jakarta.
- Pan, Zhondang and Gerald M. Kosicki, 1993, “Framing Analysis: An Approach to News Discourse” dalam *Political Communication* Vol 10 no.1.
- Severin, Werner J., James W. Tankard, Jr, 2007, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media massa*, kencana, Jakarta.
- Sudibyo, Agus, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LKiS, Yogyakarta.
- Van Dijk, Teun A., 1997, *Political Discourse and Political Cognition*, Aston University.
- Sumber Lain :**
- <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9302>, *Citra Indonesia Di Mata Dunia*.
- <http://www.tempointeraktif.com>. Bambang Subianto Kembali Diperiksa. Senin, 10 September 2007 | 15:47 WIB.
- <http://www.tempointeraktif.com>. Badan Kehormatan Segera Panggil Anggota Dewan yang Terkait Aliran Dana BI. Rabu, 27 Pebruari 2008 | 18:56 WIB.
- <http://www.tempointeraktif.com>. Kejaksaaan Hentikan Penyelidikan BLBI. Jum’at, 29 Pebruari 2008 | 12:36 WIB.
- <http://www.detik.com>. Banyak Mantan Pejabat Diperiksa, Kasus BLBI Ada Kemajuan, Senin, 10/09/2007 16:33 WIB.
- <http://www.detik.com>. Tak Ada Perpanjangan Waktu Lagi Bagi Penyelidikan BLBI, Selasa, 15/01/2008 19:27 WIB.
- <http://www.detik.com>, *Kemas: 7 Bulan Kejagung Siang Malam Selidiki BLBI*, Jumat, 29/02/2008 14:25 WIB.